



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 522 /V.09/HK/2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 26, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung, dengan susunan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat:
- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/161/V.09/HK/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/524 V.09/HK/2023
 TANGGAL : 6 - 9 - 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1. Komitmen	1.1 Kebijakan Daerah tentang PUG daerah	Perda PUG di daerah :	Ada, Peraturan daerah (Perda) No. 14 Tahun 2021 tentang PUG	Implementasi belum Maksimal	Maksimalisasi Implementasi dan Perda	Maksimalisasi Implementasi dan Perda
		Peraturan Gubernur	Ada, Peraturan Gubernur (Pergub) No. 13 Tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang PUG	Belum tersosialisasi/advokasikan kepada Para Kepala Perangkat Daerah (PD), Anggota DPRD, Lembaga Masyarakat (LM), Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) dan Dunia Usaha/swasta	melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023	Implementasi Pergub
	1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/Ka. PD	Instruksi Kepala daerah tentang PPRG	Sudah ada Perda dan Pergub tentang PUG	Pergub Belum ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur terkait Kelambagaan PUG	Menindaklanjuti dan merevisi Keputusan Gubernur terkait Kelambagaan PUG	Mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait Kelembagaan tersebut
	1.3. Rencana pencapaian PUG di masing-masing PD	SE Sekda atau Ka Bappeda tentang target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing PD	Ada, Surat Edaran Sekda Provinsi Lampung No. 045.2/3093/V.08/2019 tentang Pelaksanaan ARG	Implementasi belum maksimal	Maksimalisasi Implementasi SE Sekda	Maksimalisasi Implementasi SE Sekda

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2. Kebijakan	2.1.Dokumen Ren (Renstra, Renja)	Renstra Dinas PPPA yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG	Perda No. 10 TH.2011 ttg PUG dlm Pembangunan Daerah	Perda Nomor 14 Tahun 2021 belum dimasukan kedalam resntra	Akan merevisi Renstra	Implementasi Renstra sesuai dengan Perda 14 tahun 2021
		Adanya data terpilah	Pada Bab II Renstra DPPPA			
		- Visi dan Misi	Ada Visi : Rakyat Lampung Berjaya	Pelaksanaan Visi	Implementasi Visi	Implementasi Visi
			Misi ke 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan Misi	Implementasi Misi	Implementasi Misi
		-Program dan kegiatan yg mendukung PUG;	Ada, Pada Bab VI Renstra DPPPA	Pelaksanaan Program	Optimalisasi Pelaksanaan Program	Optimalisasi Pelaksanaan Program
		-Adanya indikator gender	Ada, Pada Bab VI Renstra DPPPA			
	2.2.Renstra PD	Persentase Renstra PD yang memuat:				

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- Adanya dasar hukum PUG	Dalam proses	Belum finalisasi renstra PD	Melakukan evaluasi dan monitoring integrasi program dan kegiatan PUG dalam renstra PD	Memasukkan PUG sebagai salah satu strategi setiap PD
		- Adanya data terpilah	Ada	Up dating data PD belum maksimal	PD melakukan perbaikan data terpilah pada masing-masing program dan kegiatan	PD melakukan perbaikan data terpilah pada masing-masing program dan kegiatan
3.Kelembagaan	3.1 Unit Organisasi yang menangani PUG di daerah	Es 2, Es 3, Non Es	Ada SK Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan staf	Adanya Pergantian SDM (Rolling)	Melaksanakan Bimtek secara kontinyu bagi SDM yg menangani PUG	Melaksanakan Bimtek secara kontinyu bagi SDM yg menangani PUG
	3.2. Adanya Pokja PUG di Daerah	SK tentang POKJA dari Kepala Daerah	Ada, SK. Gubernur No. G/159/V.09/HK/2020 ttg Pembentukan POKJA PUG	Perlu merevisi SK Pokja berdasarkan Pergub Nomor 13 Tahun 2023	Revisi SK Pokja PUG	Memaksimalkan Tupoksi Pokja PUG
	3.3. adanya <i>Focal Point</i> dimasing-masing PD	- Jumlah PD yang mempunyai Surat Penunjukan <i>Focal Point</i> dari Kepala PD	Ada, 48 PD	<i>Focal Point</i> PUG di PD belum berjalan secara maksimal	Memaksimalkan <i>Focal Point</i> PUG di PD	Memaksimalkan <i>Focal Point</i> PUG di PD

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG	Surat Keputusan Gubernur No. G/161/V.09/HK/2020 Tahun Tentang RAD PUG.	Merevisi SK RAD PUG berdasarkan Pergub Nomor 13 Tahun 2023	Implementasi terhadap RAD	Implementasi terhadap RAD
4.Sumber Daya	4.1. Perencana yang mahir	Ada, Jumlah perencana pada 48 PD yang mendapatkan sertifikat	48 Perencana	Sering terjadi Mutasi Pegawai dan Perencana PD belum memahami sepenuhnya tentang PPRG	Melaksanakan Pelatihan bagi perencana di PD Tentang PPRG	Melaksanakan Pelatihan bagi perencana di PD Tentang PPRG
	4.2. Auditor yang mempunyai sertifikat	Ada, Jumlah auditor yang mendapat sertifikat	Terdapat auditor yang mendapatakan sertifikat	Auditor yang telah dilatih belum maksimal dalam melaksanakan Audit PPRG	Auditor yang dilatih akan melaksanakan Audit PPRG pada PD	Auditor yang dilatih akan melaksanakan Audit PPRG pada PD
	4.3. Anggaran fasilitasi PUG di daerah	•Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG	Ada alokasi anggaran daerah untuk fasilitasi PUG	Anggaran Daerah kurang untuk fasilitasi PUG	Perlu dukungan Anggran Daerah dan Pusat.	Perlu dukungan Anggran Daerah dan Pusat.
	4.4 Jumlah Fasilitator di Daerah	•Jumlah faslitator yang mendapat sertifikat	Ada	Masih Kurang Fasilitator tentang PUG	Perlu dukungan dr Pemda dan Pusat untuk pelatihan fasilitator PUG/TOF PUG	Perlu dukungan dr Pemda dan Pusat untuk pelatihan fasilitator PUG/TOF PUG
		•Ratio fasilitator terhadap jml Kabupaten + PD	Masih rendah	Masih Kurang Fasilitator	Perlu dukungan dr Pemda dan Pusat untuk pelatihan fasilitator PUG/TOF PUG	Perlu dukungan dr Pemda dan Pusat untuk pelatihan fasilitator PUG/TOF PUG

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	4.5. Jumlah Gender Champion	•Jumlah orang yg memenuhi kriteria	Kurang Lebih 50 Orang	Belum ada dasar/pedoman tentang Gender Champion	Dukungan dan aturan dari Kementerian PPPA dan mengenai dasar dan Standar Gender Champion	Dukungan dan aturan dari Kementerian PPPA dan mengenai dasar dan Standar Gender Champion
5.Data dan sistem informasi	5.1. Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data PD yang mendapat sertifikat	ada pengelola data yang bersertifikasi	Belum maksimal	Mengadakan pelatihan pengelola data	Mengadakan pelatihan pengelola data
	4.2. Statistik gender/ profil gender di daerah	Adanya profil gender di daerah	Sudah ada	Perlu up dating data gender	Mengupdating data gender dan mengaktifkan forum data	Mengupdating data gender dan mengaktifkan forum data
	4.3. Data terpilah dimasing-masing OPD	Jumlah PD yang mempunyai data yang relevan menurut jenis kelamin	Ada, 48 PD	Masih lemahnya PD dalam menggunakan data terpilah dalam pembuatan GBS	Menggunakan data terpilah untuk pengambilan kebijakan dan sebagai alat analisis gender (GAP dan GBS)	Menggunakan data terpilah untuk pengambilan kebijakan dan sebagai alat analisis gender (GAP dan GBS)
	4.4. Mekanisme/sistem informasi	Ada mekanisme/sistem informasi	Ada	Belum optimal sistem informasi	Optimalisasi data simfoni	Optimalisasi data simfoni
6. Metode/ Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah	Ada Panduan Pedoman Teknis PPRG, Modul Pelatihan PPRG Alat Analisis Gender (GAP) dan Panduan Penyusunan Data Terpilah	sosialisasi pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG belum maksimal	Optimalisasi Pedoman teknis pelaksanaan PPRG pada PD dan stakeholder Kab/Kota	Optimalisasi Pedoman teknis pelaksanaan PPRG pada PD dan stakeholder Kab/Kota

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	6.2. Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah	1. Ada modul pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan	Anggaran belum tersedia untuk memperbanyak modul	Memperbanyak modul PPRG	Memperbanyak modul PPRG
			2. Ada modul Teknis Pelaksanaan PUG	Anggaran belum tersedia untuk memperbanyak modul	Memperbanyak modul pelaksanaan PUG	Memperbanyak modul pelaksanaan PUG
			3. Ada modul Pedoman Audit yang repopsif gender yang diterbitkan	Anggaran belum tersedia untuk memperbanyak modul	Memperbanyak modul PPRG dan modul auditor responsif gender	Memperbanyak modul PPRG dan modul auditor responsif gender
	6.3. Metode analisis gender yang digunakan daerah	Pedoman Teknis analisis gender GAP di daerah	Ada, Metode Alat Analisis gender dengan GAP dan GBS	PD belum memahami Pedoman Teknis analisis gender (GAB/GBS)	Memberikan Modul Pedoman Teknis	Memberikan Modul Pedoman Teknis
	6.4. Pedoman Audit yang reponsif gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah	Ada	Ketersediaan Modul kurang karena anggaran belum tersedia	Memperbanyak Modul Panduan Pengawasan PPRG di Daerah	Memperbanyak Modul Panduan Pengawasan PPRG di Daerah
		Ada buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah	Ada	Ketersediaan Modul kurang karena anggaran belum tersedia	Memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan PUG	Memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan PUG
		Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG	Ada	Ketersediaan Modul kurang karena anggaran belum tersedia	Memperbanyak bahan KIE	Mengusulkan anggaran pembuatan Modul

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
7. Peran serta masyarakat dan jejaring	Jumlah LM, PSW/G, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender didaerah atau kegiatan yang responsif gender	LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG	Ada LM/PSW/Dunia Usaha yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) berjumlah 40 dan lembaga lainnya	Lembaga organisasi perempuan, perguruan tinggi dan dunia usaha belum maksimal dalam pelaksanaan PUG di Daerah	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring
		Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap pelaksanaan PUG	Ada	Keterlibatan belum maksimal	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring
		Jumlah LM/PSW/Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Ada LM/PSW/Dunia Usaha yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) berjumlah 40 dan lembaga lainnya	Belum optimal peran serta LM/PSW/Dunia Usaha dalam kegiatan PUG	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia Usaha untuk pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia Usaha untuk pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah
		Jumlah LM/PSW/Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender	Ada LM/PSW/Dunia Usaha yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) berjumlah 40 dan lembaga lainnya	Belum optimal peran serta LM/PSW/Dunia Usaha dalam kegiatan responsif gender	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia Usaha untuk pelaksanaan kegiatan di PD yang responsive gender	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia Usaha untuk pelaksanaan kegiatan di PD yang responsive gender

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
II.PELAKSANAAN						
1. Kebijakan program dan kegiatan yang RG	1.1. Kebijakan Daerah yang responsif gender	Perda yang reponsif gender yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir	Ada, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.2. Program Pembangunan Daerah yang reponsif gender	Jumlah program yang responsive gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir	Ada	Perlunya tambahan program dari PD	Pemetaan Program dari PD	Pemetaan Program dari PD
		Persen terhadap semua program				
	1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan	Jumlah GBS kegiatan di PD dalam 2 tahun terakhir	Ada	Masih ada PD yang belum menyampaikan GBS dari Kegiatan PD	Mengumpulan dan merakitulasi GBS dari kegiatan PD	Mengumpulan dan merakitulasi GBS dari kegiatan PD
2. Kelembagaan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dengan anggaran Provinsi	Jumlah dan persentase Kab/Kota yang difasilitasi	100%	Kurang maksimal fasilitasi Kab/Kota keterbatasan anggaran APBD	Dukungan anggaran pusat dan daerah untuk fasilitasi Kab/Kota	Dukungan anggaran Pusat dan Daerah untuk fasilitasi Kab/Kota

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah daerah lain yang belajar PUG di Provinsi	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota	Ada			
	Jumlah UPTD PPPA	Jumlah UPTD PPPA	Ada, di Provinsi dan 15 Kab/Kota.			
	Kantor PD yang mempunyai ruang Laktasi	Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Laktasi	Ada	Masih kurangnya PD dalam mengadakan ruang Laktasi	Optimalisasi pembuatan Ruang Laktasi pada PD yang belum memiliki	Optimalisasi pembuatan Ruang Laktasi pada PD yang belum memiliki
3. Anggaran	ARG	• Jumlah anggaran Pemda yang responsive gender	Ada	Kurangnya pemahaman PD untuk menganalisis anggaran yang Responsif gender dari anggaran APBD	Advokasi dan pelatihan analisis gender bagi perencanaan PD agar lebih memahami ARG	Advokasi dan pelatihan analisis gender bagi perencanaan PD agar lebih memahami ARG
		• Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/Dunia Usaha	Ada	Belum maksimalnya pelaksanaan program	Koordinasi dan sinergi program antara PD dengan LM/PT/Dunia Usaha	Koordinasi dan sinergi program antara PD dengan LM/PT/Dunia Usaha
		Jumlah kajian/ penelitian yang dilakukan LM/PSW/ dunia usaha ttg gender atau PUG dalam pembangunan	Ada kajian	Belum optimal pemanfaatan kajian	Memanfaatkan hasil kajian dari PT untuk pengambilan kebijakan	Memanfaatkan hasil kajian dari PT untuk pengambilan kebijakan

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4. Peran serta masyarakat	LM yang ikut dalam pelaksanaan program yang responsif gender	Jumlah pelatihan/advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/ dunia usaha	Ada pelatihan	Kurangnya pelatihan dan advokasi	Melakukan pelatihan dan advokasi PPRG	Melakukan pelatihan dan advokasi PPRG
		Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/ dunia usaha	Ada Program	Belum optimal	Sinergi dan optimalisasi program kegiatan	Sinergi dan optimalisasi program kegiatan

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI